

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Amirudin dan A. Zainal Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Asy'ari, Hasyim, Pilkada: Catatan Hukum dan Politik, (Semarang: Diponegoro University Press, 2007)
- Bangun, Zakaria, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, (Medan: Bina Media Perintis, 2008)
- Gaffar, Janedri M, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- MD, Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Muharam, Moch. Mubarak, Pilkada Langsung Secara Serentak dan Kesejahteraan Rakyat, (Surabaya: Lembaga Transformasi, 2015)
- Purnama, Eddy, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, (Malang: Nusa Media, 2007)

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Sorensen, Gerog, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Suharizal, Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, (Malang: Setara Press, 2012)
- Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

JURNAL

- Ananingsih, Sri Wahyu, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 1 (Semarang, Januari 2016)
- Arifulloh, Achmad, Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol II No.2, (Semarang, 2015)
- Patta, Abd. Kadir, Masalah dan Prospek Demokrasi, Jurnal Academica Vol I, (Palu, 2009)
- Tyesta, Lita, Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015), Jurnal Law Reform Vol. 13 No.1, (Semarang, 2017)

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, (November, 2010)

KAMUS

Simorangkir, J.C.T, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1981)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

INTERNET

Agus, Feri, KPK Tak Izinkan Calon Kepala Daerah Yang Ditahan Berkampanye, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180215161545-32-276492/kpk-tak-izinkan-calon-kepala-daerah-yang-ditahan-berkampanye?>, diakses pada 3 Januari 2019

Belamirrus, Robertus, KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu Untuk Ganti Peserta Pilkada Yang Jadi Tersangka, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/16522831/kpk-usul-pemerintah-terbitkan-perppu-untuk-ganti-peserta-pilkada-yang-jadi>, diakses pada 21 November 2018

Sukmana, Yoga, Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/18204541/pemerintah-minta-kpk-tunda-penetapan-tersangka-para-calon-kepala-daerah>, diakses pada 2 Januari 2019

Wiwoho, Bimo, KPU Izinkan Kampanye Calon Kepala Daerah Yang Terjaring OTT, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214214324-32-276289/kpu-izinkan-kampanye-calon-kepala-daerah-yang-terjaring-ott>, diakses pada 3 Januari 2019

Wiwoho, Bimo dan Priska Sari Pratiwi, Mendagri Dorong KPU Buat Aturan Calon Kepala Daerah Tersangka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180327090406-32-286150/mendagri-dorong-kpu-buat-aturan-calon-kepala-daerah-tersangka>, diakses pada 21 November 2018